

BAB I PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di Wilayah Indonesia Bagian Timur dan secara geografis Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari luas wilayah daratan 127.346,92 km², terletak antara 113°35'31" dan 119°12'48" bujur timur, dan antara 2°34'23" lintang utara dan 2°44'14" lintang selatan. 119°00' Bujur Timur serta diantara 4°24' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas kedua setelah Papua dibagi menjadi 7 (Tujuh) Kabupaten. 3 (Tiga) kota, 103 kecamatan dan 834 desa dan 198 kelurahan. Tujuh Kabupaten tersebut adalah Paser dengan ibukota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam, dan Mahakam Ulu dengan ibukota Long Bagun sedangkan tiga kota adalah Balikpapan, Samarinda dan Bontang.

Pembangunan sub sektor perkebunan di Kalimantan Timur merupakan bagian pembangunan nasional, berorientasi pada upaya pembangunan ekonomi rakyat dengan penekanan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dan sekaligus mendukung peningkatan ekspor yang berbasis bahan baku terbarukan dan ramah lingkungan.

Sub Sektor Perkebunan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun ekologi di Kalimantan Timur. Peranan tersebut semakin penting dan strategis karena merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam yang relatif tidak tergantung pada komponen impor. Kegiatan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur dilaksanakan dengan berbagai pola pengembangan seperti pola Perkebunan Besar Swasta (PBS), Pola Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Rakyat, yang dalam periode 2013–2018 telah memberikan hasil cukup menggembirakan yang ditunjukkan

dengan peningkatan produksi di beberapa komoditi. Produksi dan luas areal diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tumbuhnya investasi baik dari swadaya murni masyarakat, bantuan pemerintah maupun perusahaan swasta perkebunan (PBS).

Sampai dengan tahun 2018 luas areal perkebunan 1.414.469 Ha (angka sementara). Sejalan dengan pertambahan luas areal, maka sebagian tanaman produksinya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan luas areal yang produktif (tanaman menghasilkan) sebagai hasil kegiatan intensifikasi dan perluasan areal pada pelaksanaan pembangunan perkebunan tahun 2018 yang terus meningkat. Produksi Perkebunan tahun 2018 sebesar 14,57 juta ton (angka sementara). Hingga tahun 2018 luas areal kelapa sawit telah mencapai 1.251.959 ha (angka sementara). Sedangkan produksi sawit pada tahun 2018 mencapai 14,48 juta ton tandan buah segar (TBS).

Tanaman Karet merupakan komoditi tradisional di Kalimantan Timur yang sudah relatif lama diusahakan sebagai perkebunan rakyat. Luas areal penanaman karet pada tahun 2018 tercatat seluas 117.463 Ha dengan produksi seluruhnya berjumlah 66.361 ton karet kering.

Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, lahan peruntukan perkebunan seluas 3.269.561 ha dengan luas yang telah dibebani ijin perkebunan sebesar 3.095.824 ha. Adapun jumlah perkebunan besar swasta di Kalimantan Timur berjumlah 358. Dilihat dari data tersebut, potensi pengembangan perkebunan masih besar.

1. Dasar Hukum

Perkembangan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai dengan dibentuknya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Kedua lembaga ini kemudian digabung menjadi Dinas Karet pada tahun 1963 yang kemudian mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur pada awal Pelita I (April 1969). Melalui Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1978 yang disempurnakan lagi dengan Peraturan

Daerah Nomor 06 tahun 1984 nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 tahun 2001 Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perubahan. Kemudian struktur organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2004. Perubahan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan lagi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2016, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan Struktur Organisasi Tata Laksana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016.

2. Gambaran Umum

A. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan membawahi Bagian Sekretariat, Bidang Pengembangan Komoditi, Bidang Usaha, Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Pengembangan Komoditi

Bidang Pengembangan Komoditi mempunyai tugas pokok untuk Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengembangan komoditi. Bidang Pengembangan Komoditi membawahi :

- a. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan
- b. Seksi Budidaya Tanaman
- c. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok untuk Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengolahan Pemasaran. Bidang Pengolahan dan Pemasaran membawahi :

- a. Seksi Pengolahan Pasca Panen
- b. Seksi Bimbingan Usaha
- c. Seksi Promosi dan Pemasaran

5. Bidang Usaha

Bidang Usaha mempunyai tugas pokok untuk Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan usaha perkebunan. Bidang Usaha membawahi :

- a. Seksi Pembinaan Usaha
- b. Seksi Penanganan Konflik Usaha
- c. Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan

6. Bidang Perkebunan Berkelanjutan

Bidang Perkebunan Berkelanjutan mempunyai tugas pokok untuk Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan perkebunan, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial dan promosi mitigasi iklim. Bidang Perkebunan Berkelanjutan membawahi :

- a. Seksi Pengendalian Kebakaran Kebun
- b. Seksi Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca
- c. Seksi Konservasi Lahan dan Air

7. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengawasan mutu benih tanaman perkebunan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu benih serta melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan membawahi :

- a. Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih
- b. Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih
- c. Sub Bagian Tata Usaha

8. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan, menyelenggarakan uji laboratorium, uji lapang, pengamatan dalam rangka pengendalian hama penyakit dan gulma/Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT) serta melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi :

- a. Seksi Pengendalian OPT
- b. Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH
- c. Sub Bagian Tata Usaha

Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini :



B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, Pegawai berjumlah 92 (Sembilan Puluh Dua) orang, dimana 91 (Sembilan Puluh Satu) merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif dan 1 (Satu) orang Pegawai Negeri Sipil titipan, dengan komposisi kepegawaian sesuai tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan dan Gender

Gender	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	9	34	10	0	53
Wanita	6	28	5	0	39
Jumlah	15	62	15	0	92

Tabel 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan eselon dan gender

Gender	Eselon					Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV	V		
Pria	0	1	6	10	0	36	53
Wanita	0	0	1	8	0	30	39
Jumlah	0	1	7	18	0	66	92

Tabel 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan gender

Gender	Pendidikan											Jumlah
	S3	S2	S1	D.IV	SM	D.III	D.II	D.I	SLTA	SLTP	SD	
Pria	0	9	25	0	0	0	0	1	18	0	0	53
Wanita	0	4	22	0	0	0	0	0	13	0	0	39
Jumlah	0	13	47	0	0	0	0	1	31	0	0	92

Tabel 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan DIKLATPIM dan gender

Gender	DIKLATPIM				Jumlah
	TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	
Pria	0	1	10	6	17
Wanita	0	0	4	5	9
Jumlah	0	1	14	11	26

Tabel 1.5. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu dan gender

Gender	JAPUNG Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	0	1	4	0	5
Wanita	2	1	0	0	3
Jumlah	2	2	4	0	8

Selain Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur juga mempunyai Tenaga Kontrak sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang

C. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik telah menyusun, menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur yang bersifat teknis dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun SOP Dinas Perkebunan yang bersifat teknis sebanyak 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) SOP terdiri dari SOP Non Teknis sejumlah 68 (Enam Puluh Delapan) dan SOP Teknis sejumlah 63 (Enam Puluh Tiga) dengan flowchart SOP sebagaimana terlampir.

D. Visi Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, bahwa Renstra SKPD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari renstra SKPD. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra SKPD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dituangkan didalam Renstra masing-masing SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 46 tahun 2008, Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ingin diwujudkan melalui pembangunan subsektor perkebunan selama tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Perkebunan yang Tangguh untuk Mendukung Agroindustri dan Ekonomi Hijau”

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kekuatan dalam memaknai kalimat di setiap rangkaian kata-katanya, bahwa Dinas Perkebunan sebagai instansi/lembaga dibawah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengemban tugas untuk mengawal Program Pembangunan yang menjadi Visi Gubernur Kalimantan Timur, berdasarkan formulasi hasil analisis sektor perkebunan dalam kerangka pengembangan potensi daerah, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pokok serta antisipasi isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai Visi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 yaitu **"Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan"**, maka Dinas Perkebunan mempunyai kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi Gubernur dengan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut.

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan untuk memperkuat lini subsektor perkebunan sebagai salah satu

penyangga struktur ekonomi sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penjabaran dari visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dijelaskan sebagai berikut :

Terwujudnya perkebunan yang tangguh yaitu realisasi potret subsektor perkebunan yang secara dinamis dan optimal mampu memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi pada lingkungan fisik dan sosial sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan peningkatan kesejahteraan petani perkebunan (pekebun). Karakteristik utama dalam pembentukan perkebunan yang tangguh adalah perencanaan setiap instansi yang terkait dengan subsektor perkebunan dalam menghasilkan produk berkualitas, beranekaragam, berdaya saing serta secara kontinyu dan konsisten mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi sehingga sumber daya lahan yang digunakan dapat lestari dan pendapatan petani/perkebun dapat berkembang. Untuk mencapai hal tersebut, dukungan yang dibutuhkan tidak hanya berasal dari pemerintah selaku pengambil kebijakan, namun juga masyarakat sebagai subyek dari pelaksana pembangunan perkebunan dan swasta sebagai investor penunjang aktivitas perekonomian.

Indikasi pencapaian perkebunan yang tangguh dapat dilihat pada keberhasilan sistem di subsektor perkebunan yang ditopang oleh infrastruktur, kebijakan, komponen pendukung dan efisiensi struktur mekanisme sehingga peningkatan hasil-hasil perkebunan dapat dinikmati oleh konsumen terutama masyarakat Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya dan penduduk Indonesia atau mancanegara pada umumnya. Sedangkan kaitannya dengan produsen subsektor perkebunan, peningkatan kesejahteraan pekebun secara nyata dan berkelanjutan menjadi indikasi utama dari tangguhnya perkebunan dalam tataran pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur.

Ketangguhan juga dikaitkan dengan kemampuan dalam pengelolaan perkebunan yang lebih antisipatif terhadap isu strategis dan dinamika lingkungan eksternal baik ditingkat nasional maupun internasional. Perubahan *mind-set* setiap pelaksana program/kegiatan subsektor

perkebunan dari pengelolaan sistem perkebunan tradisional ke arah sistem modernisasi menjadi lompatan besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan antisipasi isu-isu strategis yang berkembang.

Dukungan terhadap pengembangan agroindustri dan ekonomi hijau diwujudkan dalam bentuk ketersediaan berbagai komoditi unggulan subsektor perkebunan dalam menghasilkan produk-produk agroindustri dan sumbangan subsektor perkebunan sebagai sumber daya alam terbaharukan sehingga berperan aktif dalam pembentukan ekonomi hijau. Oleh karena itu, visi Dinas Perkebunan sebagai penanggungjawab teknis subsektor perkebunan menjadi salah satu penentu utama pencapaian visi Provinsi Kalimantan Timur dimana pembangunan daerah harus terealisasi tanpa mengorbankan generasi mendatang (dalam koridor peningkatan kualitas lingkungan hidup).

Sebagaimana diketahui, **agroindustri** adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil produksi pertanian/perkebunan sebagai bahan baku kemudian merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk pengolahan lebih lanjut sehingga memiliki nilai tambah dan berdaya saing. Dukungan subsektor terhadap agroindustri diwujudkan dalam bentuk penyediaan produk unggulan perkebunan sebagai dasar olahan pada berbagai industri skala menengah ataupun besar. Pengembangan agroindustri perkebunan memiliki prospek yang cerah dan peluang keberhasilan tinggi untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dalam rangka peningkatan kualitas perekonomian sektor pertanian. Selain itu, agroindustri dapat menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian daerah karena industri pengolahan mampu mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, yang akhirnya keunggulan tersebut akan memperkuat daya saing produk unggulan yang dikembangkan.

Ekonomi Hijau, menurut UNEP (*United Nation Environment Program*) memiliki pengertian bahwa ekonomi hijau merupakan perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Ekonomi

hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dengan prinsip dasar bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan bersama-sama melalui penurunan emisi sekaligus memperhatikan pembangunan yang berprinsip *Pro-Growth*, *Pro-Job* dan *Pro-Environment*.

Pelaksanaan ekonomi hijau juga diwujudkan melalui pelaksanaan RAN-GRK, serta implementasi Stranas REDD+ dan SRAP REDD+ Kalimantan Timur. Dengan memperbaiki pengelolaan perkebunan menuju ekonomi hijau, hingga pengelolaannya lebih memperhatikan sosial dan lingkungan, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkebunan, serta memberikan manfaat ekonomi, yang juga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Setelah perumusan visi pembangunan di subsektor perkebunan, tahapan selanjutnya adalah menjabarkan visi tersebut menjadi misi-misi yang akan diemban oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama masa periode perencanaan pembangunan daerah. Pernyataan perwujudan visi melalui misi-misi Dinas Perkebunan dimaksudkan agar setiap elemen kelembagaan Dinas Perkebunan maupun pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui, mengenal, dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan setiap detail misi yang telah disepakati. Oleh sebab itu, dalam setiap peranan Dinas Perkebunan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan yang jelas terutama dalam merealisasikan misi-misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, kemudian mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Permasalahan utama dalam pembangunan perkebunan adalah masih rendahnya produksi dan produktivitas lahan, khususnya pada usaha perkebunan rakyat. Faktor yang menjadi penyebab rendahnya produktivitas antara lain disebabkan karena :

1. Penggunaan benih tanaman perkebunan yang tidak bermutu (*palsu/illegal*),
2. Kurangnya penyediaan pemanfaatan sarana produksi (pupuk, obat-obatan, pestisida, dll) serta input teknologi dalam pengelolaan perkebunan,
3. Terbatasnya infrastruktur pendukung baik untuk budidaya masa, pengelolaan pasca panen maupun pemasaran hasil,
4. Masih adanya gangguan eksternal usaha perkebunan berupa gangguan OPT (organisme pengganggu tanaman) maupun non OPT seperti terjadinya bencana alam atau konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.

Dalam pencapaian realisasi misi Dinas Perkebunan, perlu adanya pengembangan agribisnis melalui program taktis di setiap lini pengembangan subsektor. Oleh sebab itu, dalam mengawal pengembangan agribisnis perkebunan perlu adanya :

1. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis komoditi,
2. Dukungan dalam pengembangan pasar modal yang memungkinkan petani sebagai pemegang saham perusahaan,
3. Pengembangan inovasi teknologi dan kelembagaan,
4. Pengembangan keseimbangan perdagangan domestik dan internasional,
5. Pengembangan investasi kebun lengkap dengan pengolahannya, serta
6. Dorongan pada pengembangan industri hilir.

Dalam jangka menengah (kurun waktu 5 tahun ke depan), secara makro komoditi perkebunan Provinsi Kalimantan Timur seperti kelapa sawit, karet, kakao, lada, dan kelapa memiliki kesempatan dalam pengembangan produk yang tinggi sehingga dapat berperan sebagai

sumber devisa, penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan petani serta berperan dalam upaya peningkatan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan pada tingkat mikro, beberapa komoditi perkebunan (kelapa sawit dan karet) telah menjadi sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usahanya. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan pengembangan komoditas unggulan perkebunan dalam jangka menengah tahun 2013-2018, ditempuh serangkaian program peningkatan produksi subsektor perkebunan melalui :

1. Peningkatan produktivitas lahan,
2. Penambahan luas areal, rehabilitasi, optimalisasi, dan diversifikasi lahan,
3. Penanganan gangguan usaha dan konflik sosial, serta
4. Pengembangan dan peningkatan sistem data base perkebunan.

Dengan peningkatan produksi dan kualitas komoditas perkebunan, diharapkan pendapatan petani perkebunan meningkat secara merata sehingga kesejahteraan petani secara keseluruhan dapat terwujud.

2. Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah Produk

Produk utama perkebunan yang dihasilkan petani pekebun di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar dalam bentuk produk primer dan hanya sedikit yang diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Produk primer tersebut selama ini lebih banyak untuk mengisi pasar-pasar ekspor dan sumber devisa untuk selanjutnya diolah oleh pihak luar. Petani pekebun masih sangat terpaku pada keluaran produk-produk perkebunan dalam bentuk komoditas primer seperti *crumb rubber*, CPO, lada putih/hitam, biji kakao (glondongan) dan lain-lain. Padahal di lain pihak perdagangan internasional bersikap sangat tidak adil terhadap produk-produk primer ini karena nilai jual produk primer yang rendah kemudian diolah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi dengan harga jual yang jauh lebih tinggi.

Salah satu permasalahan dalam pemasaran produk primer perkebunan adalah fluktuasi harga yang tinggi pada produk primer perkebunan di luar batas keseimbangan penawaran dan permintaan. Hal tersebut

dapat terjadi karena spekulasi pedagang besar komoditas di tingkat global sedangkan di pasar antar komoditas, struktur pasar komoditas primer masih cenderung searah sehingga akan merugikan petani sebagai pemangku kepentingan yang paling besar peranannya dalam memproduksi komoditas pertanian. Konsekuensi dari berbagai permasalahan tersebut adalah lambatnya kenaikan harga jual produk pertanian di tingkat global dan sebaliknya jika terjadi penurunan harga di tingkat global akan signifikan mempengaruhi harga jual pada level petani. Kondisi di atas menyebabkan nilai produk primer pertanian relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai produk olahan pertanian melalui agroindustri.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pada dasarnya adalah kegiatan agroindustri yang memiliki keterkaitan langsung antara proses hulu ke hilir, sehingga mampu menarik kemajuan sektor pendukung lainnya. Cara yang tepat dan cepat untuk meningkatkan nilai tambah produk adalah dengan cara pengembangan agroindustri di subsektor perkebunan baik dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi. Dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka menengah (tahun 2013-2018) maka ditempuh serangkaian program dan kegiatan peningkatan mutu hasil, peningkatan teknologi terapan dan penganeekaragaman produk olahan perkebunan. Program/kegiatan tersebut diimplementasikan melalui kegiatan penyediaan teknologi sarana dan prasarana pengolahan hasil, optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin serta peningkatan mutu produk olahan (pemberlakuan produk wajib sertifikat mutu). Dengan meningkatnya mutu dan penganeekaragaman produk olahan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan di pasar regional maupun internasional.

3. Memperkuat Aspek Kelembagaan dan Pemasaran

Sumber daya manusia yang bergerak di subsektor perkebunan menjadi poin penting dalam mewujudkan visi renstra Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Timur baik pada periode saat ini maupun periode-periode yang akan datang. Namun hal tersebut menjadi permasalahan saat ini, karena petani perkebunan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur kurang memiliki *skill* yang memadai dalam menjalankan usaha perkebunannya baik dari segi kemampuan teknis maupun kemampuan manajerial. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan petani sebagai upaya mendampingi, memotivasi serta mendorong petani untuk mengorganisasikan diri dalam suatu wadah kelembagaan usaha untuk mensinergikan setiap potensi yang dimiliki. Dengan adanya optimalisasi kelembagaan tersebut, diharapkan kemampuan petani pekebun dari segi teknis, manajemen hingga pemasaran hasil perkebunan dapat meningkat sehingga terbentuk pekebun yang handal sekaligus organisasi perkebunan masyarakat yang kuat dan mandiri. Realisasi dari misi ini akan mendorong peningkatan posisi tawar pekebun dalam aspek usaha perorangan maupun dalam melakukan kerjasama dengan mitra usahanya.

Poin penting dalam penguatan aspek kelembagaan dan pemasaran adalah penyempurnaan koordinasi dan komunikasi baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota atau dari pemerintah daerah ke satuan kerja perangkat daerah terkait.

Penguatan aspek kelembagaan dan pemasaran merupakan pendukung dari misi pertama dan kedua yang mengimplementasikan peningkatan produksi perkebunan, peningkatan kualitas hasil produksi, dan peningkatan nilai tambah produk. Di Provinsi Kalimantan Timur, salah satu model pemberdayaan petani dan kelembagaan yang telah dilaksanakan pada subsektor perkebunan dan menunjukkan hasil yang positif adalah model pemberdayaan petani dan kelembagaan melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) berdasarkan manajemen kemitraan.

4. Mengembangkan Perkebunan yang Berkelanjutan

Salah satu isu strategis yang menjadi acuan perencanaan setiap pembangunan di seluruh belahan dunia adalah terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan tanpa mempengaruhi pembangunan wilayah. Namun di sisi lain, sejarah membuktikan bahwasanya pembangunan ekonomi dalam kerangka pembangunan nasional selalu bertolak belakang dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup karena seiring dengan berkembangnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat maka konsumsi energi, sumber daya alam hingga kebutuhan lahan akan terus meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya titik temu dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan daerah akan menstimulasi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sebaliknya.

Dalam kaitannya dengan subsektor perkebunan sebagai ranah kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, peningkatan kualitas subsektor perkebunan secara garis besar akan beriringan jalan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup karena setiap komoditas tanaman perkebunan merupakan sumber daya alam terbarukan. Meskipun begitu, perlu adanya perlakuan khusus pada pola penanaman beberapa komoditas tertentu agar tidak merusak unsur hara tanah, contoh riil permasalahan komoditas perkebunan seperti tingginya penggunaan pupuk kimia dan pestisida terutama pada komoditas tertentu sebagai upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi, namun disisi lain penggunaan pupuk dan pestisida secara *massive* akan menghabiskan bahan baku pupuk maupun pestisida yang sebagian merupakan sumber daya tidak terbarukan.

Masalah lain yang muncul sebagai akibat revolusi hijau adalah dengan ditinggalnya praktek penggunaan bahan organik oleh petani dan diganti dengan pengangkutan biomassa secara besar-besaran sehingga sebagian besar lahan pertanian hanya mempunyai kandungan bahan organik kurang dari satu persen. Rendahnya kandungan bahan organik tanah akan menyebabkan tanah rentan terhadap degradasi kesuburan

sehingga ketergantungan petani pada ketersediaan pupuk kimia semakin meningkat.

Perkebunan yang berkelanjutan adalah aktivitas budidaya komoditas perkebunan yang secara terpadu memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai perhatian terhadap keberlangsungan masa depan dunia. Berkenaan dengan hal tersebut program perkebunan berkelanjutan akan :

1. Dapat memenuhi kebutuhan pangan dan energi,
2. Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam,
3. Mengefisiensikan pemanfaatan sumber daya tidak terbarukan dengan pemanfaatan sumberdaya hayati,
4. Menguntungkan secara ekonomis, dan
5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan petani dan masyarakat.

Dengan demikian maka pengertian perkebunan berkelanjutan menekankan pada :

- a. Keberlanjutan produktivitas,
- b. Kualitas lingkungan,
- c. Efisiensi pemanfaatan sumber daya tidak terbarukan,
- d. Kelayakan ekonomis, dan
- e. Kualitas kehidupan.

Sederhananya, pertanian berkelanjutan mencakup tiga aspek kehidupan, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial.

Dengan pengertian tersebut, maka praktek perkebunan yang menekankan keuntungan (jangka pendek) dengan mengorbankan kualitas lingkungan akan memiliki dampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Dilain pihak, praktek perkebunan yang menekankan kualitas lingkungan dengan mengabaikan keuntungan jangka pendek juga tidak sesuai dengan misi perkebunan berkelanjutan. Demikian pula usaha pertanian yang sangat produktif tetapi menggunakan sumber daya tidak terbarukan dalam jumlah yang banyak (misal bahan bakar fosil atau sumber daya air tidak terbarukan) juga tidak akan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dengan persyaratan bahwa

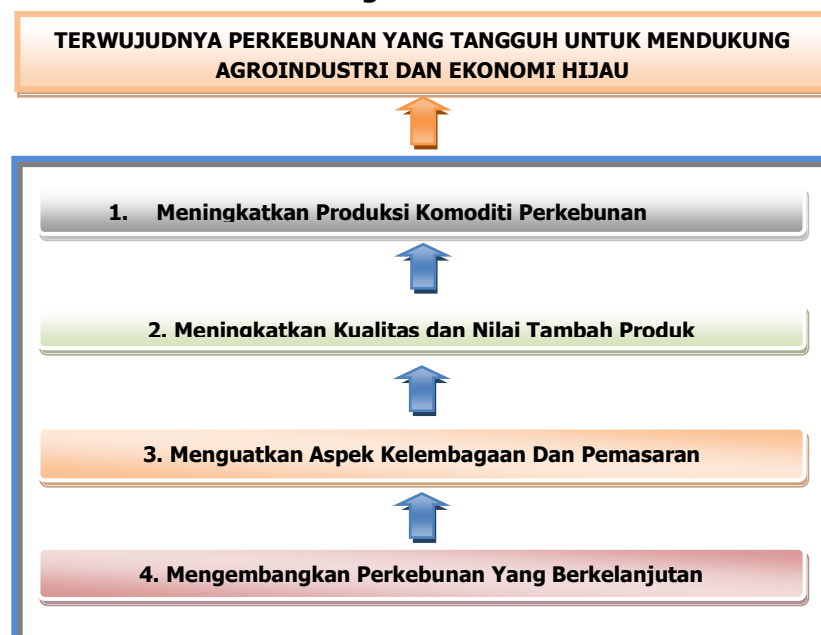
pertanian berkelanjutan harus menguntungkan secara ekonomis, mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka pilihan teknologi berbasis sumber daya hayati merupakan teknologi yang paling tepat untuk mewujudkan perkebunan berkelanjutan.

Pembangunan perkebunan jika dilaksanakan dengan menerapkan GAP (*Good Agriculture Practices*) dan GMP (*Good Manufacturing Practices*) serta prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan akan mewujudkan perkebunan berkelanjutan berasaskan pertumbuhan ekonomi hijau. Provinsi Kalimantan Timur masa mendatang akan berupaya untuk merevitalisasi bidang perkebunan dalam rangka mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (*green development*) dengan program dan kegiatan yang meliputi pengembangan perkebunan berupa pemanfaatan lahan terdegradasi/kritis, optimalisasi penggunaan lahan serta penerapan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).

Dari keempat misi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2

Hubungan Visi dan Misi



Dari gambar di atas tampak jelas bahwa untuk menjamin terwujudnya visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dibutuhkan empat misi yang selaras dan melengkapi. Pada gambar di atas, secara implisit menunjukkan bahwa peningkatan produksi merupakan misi utama agar agroindustri dapat diwujudkan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dua misi berikutnya yaitu peningkatan kualitas dan nilai tambah produk serta penguatan aspek kelembagaan dan pemasaran subsektor perkebunan. Namun sebagai pondasi awal dalam pelaksanaan misi-misi tersebut perlu diperhatikan asas perkebunan berkelanjutan sebagai patokan utama di setiap tahapan pelaksanaan program/kegiatan. Jika misi-misi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan strategis Dinas Perkebunan maka bukan hal yang mustahil agroindustri dan ekonomi hijau di Provinsi Kalimantan Timur akan terwujud.

E. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah baik secara umum maupun sektoral. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Strategi harus bersifat incremental (terus meningkat) serta taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepakatan melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam

pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyusun strategi dalam mengaplikasikan setiap program/kegiatan pembangunan daerah khususnya subsektor perkebunan. Berikut strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan dalam Renstra tahun 2013-2018:

Strategi 1: Peningkatan produksi perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa komoditas perkebunan yang efektif sebagai lokomotif perkembangan perekonomian sekaligus “jalan” dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Komoditas utama perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur antara lain kelapa sawit, kakao, karet, kelapa dalam, dan lada. Meskipun begitu, kajian-kajian untuk penambahan komoditas unggulan terus dilaksanakan karena peningkatan hasil produksi pertanian (perkebunan pada khususnya) akan diperhitungkan dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan. Selain karena merupakan sumber daya alam yang terbaharukan, hasil produksi perkebunan dapat dijual secara “mentah” maupun dijual dengan nilai tambah (pengolahan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi).

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut :

- ✓ Meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan;
- ✓ Meningkatkan luas areal perkebunan;
- ✓ Pengembangan data/informasi dan pengendalian pembangunan perkebunan; dan
- ✓ Penurunan tingkat gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Strategi 2 : Pembinaan kelompok-kelompok usaha penghasil produk

Hasil perkebunan yang melimpah dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil menengah untuk memberikan nilai tambah pada produk mentah sehingga memiliki nilai tambah/nilai jual tinggi ketika “dilempar” ke pasar. Dinas perkebunan mempunyai strategi untuk membina kelompok-kelompok usaha berskala kecil dan menengah untuk mengolah hasil perkebunan menjadi barang yang lebih bermanfaat dan berdaya saing melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun pendampingan dalam pengembangan industri berbasis rumah tangga. Pembinaan kelompok-kelompok usaha akan menjadi penggerak industri pengolahan mikro/kecil sekaligus menjadi upaya menciptakan produk unggulan dari hasil perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

- ✓ Penyediaan teknologi budidaya, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil;
- ✓ Penerapan dan pelatihan teknologi budidaya yang baik dan benar;
- ✓ Peningkatan kualitas produk hasil perkebunan hingga masuk kualifikasi SNI; dan
- ✓ Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah.

Strategi 3 : Peningkatan proses pengolahan komoditas perkebunan

Sebagian besar hasil perkebunan dijual secara mentah karena banyak dari masyarakat pertanian yang belum mengetahui cara pengolahan hasil perkebunan. Seperti komoditas kakao, oleh pekebun, kakao diambil bijinya untuk dikeringkan kemudian langsung dijual ke penadah, padahal biji kakao bisa diolah sendiri oleh petani untuk meningkatkan nilai jual hasil olahan biji kakao.

Penting adanya peran Dinas Perkebunan untuk memberikan sosialisasi dan menyediakan sarana pengembangan teknologi pengolahan komoditas merupakan strategi yang tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya peningkatan nilai tambah di setiap komoditas perkebunan, diharapkan kesejahteraan pekebun dapat meningkat seiring

bertambahnya pendapatan dari subsector perkebunan.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut :

- ✓ Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi pengolahan perkebunan;
- ✓ Pengembangan sector perkebunan dengan teknologi pengolahan produk perkebunan; dan
- ✓ Pengembangan jenis hasil produk perkebunan primer menjadi produk sekunder.

Strategi 4 : Penguatan/optimalisasi kelembagaan petani dan kemitraan pemasaran komoditi

Minimnya pengetahuan petani perkebunan terhadap segala macam informasi terkait perkembangan teknologi, keterampilan berkebun, hingga pemasaran hasil panen membuat kerugian tersendiri bagi pekebun dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti pada kasus penjualan hasil panen produk mentah perkebunan kepada penadah tanpa mengetahui harga komoditas perkebunan di pasaran. Hal tersebut menyebabkan pekebun dapat dirugikan karena harga yang ditawarkan penadah jauh di bawah harga pasar. Oleh sebab itu penting adanya suatu organisasi atau kelembagaan yang menaungi petani secara umum dan pekebun secara khusus dalam mengelola hasil pertanian dari hulu ke hilir.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut :

- ✓ Penguatan dan pengembangan kelembagaan dan asosiasi petani;
- ✓ Peningkatan kemandirian kelompok petani/pekebun/gapoktan;
- ✓ Peningkatan kemitraan kelompok tani; dan
- ✓ Peningkatan kapasitas koperasi sekunder pertanian.

Strategi 5: Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur fungsional teknis perkebunan

Wilayah perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat di satu daerah saja, tetapi tersebar di berbagai penjuru wilayah Provinsi

Kalimantan Timur. Fungsi pengawasan dan pengarahan kepada petani perkebunan harus dilakukan secara merata dan kontinyu agar peningkatan kualitas perkebunan tetap terjaga. Untuk melaksanakan tugas dalam fungsi pengawasan dan pengarahan, Dinas perkebunan memerlukan sumber daya manusia yang menguasai teknis fungsional perkebunan secara kualitas maupun kuantitas sehingga pemerataan aparatur fungsional di setiap titik perkebunan dapat terjangkau.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut :

- ✓ Pengadaan rekrutmen dan pelatihan aparatur fungsional teknis perkebunan; dan
- ✓ Peningkatan pembangunan infrastruktur akses ke kawasan perkebunan.

Strategi 6 : Penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan

Dalam rangka mengantisipasi isu strategis terkait lingkungan hidup, penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang berkelanjutan menjadi poin penting dalam pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan. Pengelolaan perkebunan dari awal penanaman hingga pasca panen harus memenuhi syarat mutlak berupa ramah lingkungan. Oleh karena itu, dalam mengaplikasikan strategi tersebut, Dinas Perkebunan akan membuat langkah-langkah langsung seperti penggunaan pupuk alami dan mengurangi penggunaan pupuk buatan pabrik/kimia (yang mengakibatkan residu tanah dan mengurangi kualitas unsur hara pada tanah). Selain itu, Dinas Perkebunan akan memonitoring industri pengolahan hasil perkebunan dimana pengolahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip agroindustri yang ramah lingkungan.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut :

- ✓ Pencegahan dan pengurangan emisi limbah perkebunan;
- ✓ Pengendalian hama terpadu perkebunan rakyat; dan
- ✓ Penyuluhan dan pengembangan riset tentang pembangunan perkebunan yang ramah lingkungan.